

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Di Kabupaten Keerom

Gunung Hasian Siahaan, Syaikhul Falah, B. Elitha Bharanti
gununghasian32@gmail.com sehufallah@gmail.com

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

Presentation and accessibility of financial statement is influenced by accountability and commitment of management in managing SKPDs' finances, which also affecting the audit opinion that reflect how well finance of a local government has been managed. The purpose of this study is to examine and analyze the influence of financial statement presentation, accessibility of financial statements and management commitment regarding transparency of financial management at SKPDs in Keerom Regency. Population of this research is around 56 with 94 respondents which categorized as Head of SKPDs and the Expenditure Treasurer on each SKPD that all are assembled as the sample of this study. Then, a random sampling method is constructed as a sample method in conducting this research. The data collection is done by conducting a survey. While, hypothesis analysis in this study is empirically tested by using Multiple Regression Analysis. This paper find that the area of financial statement presentation has a positive and significant impact on the transparency of management of the Regional Financial reports. While, accessibility of local financial statement has not affect to the transparency of financial management in Keerom Regency. The results also indicate that the leadership commitment has a significant and positive effect on the transparency of financial management in Keerom Regency.

Keywords: *Regional financial statements, financial statements accessibility, management commitments and financial management transparency*

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas atau kinerja pelaksanaan pemerintahan, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan. Partisipasi dimaksud dapat berasal dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan ataupun dari masyarakat sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan (Fabanyo, 2011).

Hal diatas merupakan respon dari adanya tuntutan masyarakat, akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Prihartono, 2009). Tuntutan lahirnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku tersebut bukan saja muncul sekarang namun merupakan wacana yang cukup mengemuka dalam dekade terakhir, dimana negara-negara berkembang termasuk Indonesia diajak untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Perbaikan dimaksud dilakukan melalui pengadopsian "good governance" sebagaimana dipromosikan oleh *World Bank*, *UNDP*, *United Nations* dan beberapa ageninternasional lainnya (Fabanyo, 2011).

Pentingnya pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri pengelolaan negara yang baik dan bertanggung jawab yang kita kenal dengan istilah *good governance*". Lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan hukum yang ada menjadi pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan dan keuangan negara serta maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan" (nasional.sindonews.com).

Kajian terdahulu yang menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah telah banyak dilakukan. M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012) menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta. Peneliti lain yakni Aliyah dan Nahar, (2012) yang melakukan penelitian di pemerintah Kabupaten Jepara menegemukakan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang sejalan juga disampaikan Sande, (2013) yang juga menyatakan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sejalan dengan kedua hasil penelitian diatas, Anim Wiyana dan Anna Sutrisna S., (2014) juga mengungkapkan hasil yang sama yakni; aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar baik secara parsial maupun simultan. Penelitian lainnya, Adha, (2014) yang melakukan penelitiannya pada seluruh SKPD Kota Dumai menemukan bahwa akuntabilitas dan Komitmen Pimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai dan ketidakpastian Lingkungan menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

Hehanussa, (2015) dalam kajiannya di Kota Ambon, menyatakan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang paling baru dilakukan oleh Kurniawati, (2016) menyatakan bahwa Penyajian, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistim akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Jember.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti memutuskan untuk mengkaji secara mendalam tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Model konseptual yang dibangun dalam kajian ini merupakan pengembangan model kajian-kajian terdahulu yang telah diuraikan diatas, yakni pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan serta komitmen pimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Keerom. Pemilihan Kabupaten Keerom didasarkan pada realita yang terjadi selama beberapa tahun terakhir yakni status laporan keuangan daerah yang masih berstatus disclaimer. Sehingga perbedaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian yang dipilih.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap tranparansi pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap terhadap tranparansi pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom?
3. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh terhadap terhadap tranparansi pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap tranparansi pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom.
2. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap tranparansi keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom.
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen pimpinan terhadap tranparansi pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kegunaan-Keputusan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder.

Teori kegunaan-keputusan informasi sangat relevan, karena Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia mengadopsi karakteristik kualitatif dari SFAC No.2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

Teori Stakeholder

Freeman (1984) dalam Mainardes et al. (2011) menjelaskan Stakeholder theory, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan stakeholders ketika membuat keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbeda tentang Stakeholder theory, prinsipnya sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick et al., 1992 dalam Mainardes et al., 2011)

Berdasarkan kajian mendalam literatur Bovaird (2005), Frey (2003), Reidl (2004) dalam Huda (2009) mengidentifikasi tujuh stakeholder administrasi lokal, yaitu: masyarakat, bisnis, administrasi public lain, politisi, parlemen dan lembaga peradilan, *non governmental organization* (NGO), *international organization* (IO) dan asosiasi, serta media masa yang ada.

Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Pemikiran yang mendasari teori institusional (*Institutional Theory*) adalah didasarkan pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung (Meyer dan Rowan, 1977). Scott (2008) dalam Villadsen (2011) menjelaskan bahwa teori institusional digunakan untuk

menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang kuat dan populer, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen (Dacin, 1997; Dacin et al., 2002), faktor eksternal (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004) faktor sosial (Scott, 2004), faktor ekspektasi masyarakat (Ashworth et al., 2009), faktor lingkungan (Jun dan Weare, 2010).

Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial (DiMaggio dan Powell 1983; Frumkin dan Galaskiewicz, 2004; Ashworth *et al.*, 2009) dimana organisasi berada. Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka (Cavalluzzo dan Ittner, 2004) dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer dan Rowan, 1977). Organisasi publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme (*isomorphism*) dengan organisasi publik lain (DiMaggio dan Powell, 1983).

Transparansi Pelaporan Keuangan

Stiglitz (1999) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hak asasi setiap manusia. Transparansi secara luas berarti melakukan tugas dengan cara membuat keputusan, peraturan dan informasi lain yang tampak dari luar (Hood, 2010). Hood (2007) menyatakan bahwa transparansi sebagai sebuah konsep mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang input, output, dan *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara input, output, dan *outcome*), transparansi *real-time* (informasi yang dirilis segera), atau transparansi retrospektif (informasi tersedia berlaku surut).

Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (managemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan. Selanjutnya, Silver (2005) mendefinisikan transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond, (2002) pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan diartikan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Komitmen Pimpinan

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola SDM. Dalam studi manajemen sumber daya manusia, komitmen organisasional sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi telah menjadi hal penting yang telah banyak didiskusikan dan diteliti. Alasannya sangat sederhana, contohnya sebaik apapun visi, misi, dan tujuan organisasi, tidak akan tercapai jika tidak ada komitmen dari anggota organisasinya (Johnson Dongoran, 2001).

Mowday *et.al.*, (1979) mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi khusus, meliputi kepercayaan, dukungan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan keinginan yang kuat untuk menggunakan upaya yang sungguh-sungguh untuk kepentingan organisasi, dan kemauan yang kuat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasional menunjuk pada pengidentifikasian tujuan individu dengan tujuan organisasi, kemauan untuk mengerahkan segala upaya kepentingan organisasi dan keterikatan untuk tetap menjadi bagian organisasi (Mowday *et.al.*, (1979). Sebagai definisi yang umum, Luthans, (2002) mengartikan komitmen merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas individu dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Keerom

Aliyah dan Nahar, (2012) yang melakukan penelitian di pemerintah Kabupaten Jepara menegemukakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang sejalan juga disampaikan Sande, (2013) yang juga menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sejalan dengan kedua hasil penelitian diatas, Anim Wiyana dan Anna Sutrisna S., (2014) juga mengungkapkan hasil yang sama yakni; dan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar baik secara parsial maupun simultan. Hehanussa, (2015) dalam kajiannya di Kota Ambon, menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang paling baru dilakukan oleh Kurniawati, (2016) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan sistim akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Jember. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₁: Penyajian LKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelola Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Keerom

Kajian empiris tentang efek aksesibilitas LKD terhadap transparansi dan akuntabilitas LKD dalam kajian ini berpedoman pada hasil kajian oleh Aliyah dan Nahar, (2012) yang menyatakan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.

Hasil kajian ini selanjutnya diperkuat oleh hasil kajian empiris lain antara lain; Sande, (2013); Anim Wiyana dan Anna Sutrisna S., (2014); Hehanussa, (2015) dan Kurniawati, (2016) yang keseluruhannya menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H2: Aksesibilitas LKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom

Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan LKD pada SKPD Kabupaten Keerom

Pedoman panarikan hipotesis penelitian yang terakhir ini didasari pada hasil kajian M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki, (2012) menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta. Peneliti lain yakni Wendi Adha, (2014) yang melakukan penelitiannya pada seluruh SKPD Kota Dumai menemukan bahwa komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

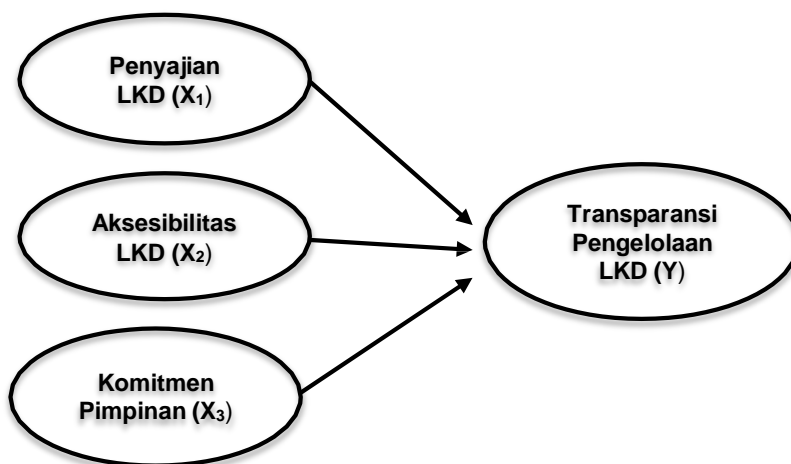
H3: Komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom

Model Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu Penyajian LKD (X_1), Aksesibilitas LKD (X_2), dan Komitmen Pimpinan (X_3) dan 1 variabel dependen yaitu Transparansi Pengelolaan LKD, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

Gambar 1

Model Penelitian



Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini, 2017

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden (subjek) dalam kuisioner penelitian. Teknik pengumpulan data primer yang dikumpulkan meliputi data responden, pengaruh; penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, komitmen pimpinan serta transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Keerom.

Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam kajian ini yang menjadi populasi adalah pegawai pada 56 SKPD di Kabupaten Keerom. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* yaitu penarikan sampel secara acak sederhana. Pemilihan teknik ini karena data *base* SKPD di Kabupaten Keerom diketahui dengan pasti yang seluruhnya berjumlah 56 SKPD. Selanjutnya penarikan sampel dilakukan dengan memilih 2 pegawai dari masing-masing SKPD (pegawai tersebut adalah pimpinan SKPD dan bendahara pengeluaran) sehingga jumlah sampel keseluruhan berjumlah 112 pegawai (56 SKPD x 2).

Definisi Operasional Variabel

Penyajian Laporan Keuangan

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1). Penyajian Laporan Keuangan Daerah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Variabel ini diukur melalui 4 indikator (PP No. 24 Tahun 2005 dan No. 71 Tahun 2010) yang selanjutnya terjabarkan dalam 8 pernyataan yang menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Variabel ini diukur melalui 2 indikator yang selanjutnya terjabarkan dalam 6 pernyataan yang menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5.

Komitmen Pimpinan

Komitmen Pimpinan merupakan variabel independen (X3) dalam penelitian ini. Komitmen Pimpinan adalah sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Variabel ini diukur melalui 5 indikator yang dikembangkan berdasarkan pendapat Ganesan, Shankar dan Barton A. Weitz, (1996) dalam Fuad Mas'ud, (2004) sebagai berikut; kesediaan untuk bekerja keras, kesamaan nilai pegawai dan organisasi, kebanggaan terhadap organisasi, peduli organisasi dan perasaan gembira pegawai. Selanjutnya indikator tersebut dijabarkan dalam 10 pernyataan yang menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5.

Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini. Transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik. Variabel ini diukur melalui 2 indikator (diadopsi dari Aliyah, 2012) yang terdiri dari 5 pernyataan yang menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) yang secara linier menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dependen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah pengaruh penyajian LKD, aksesibilitas LKD, dan Komitmen Pimpinan terhadap transparansi pengelolaan LKD pada SKPD di Kabupaten Kerom. Adapun model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan;

Y = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Intercept/Constant

β = Koefisien Regresi

X1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

X3 = Komitmen Pimpinan

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Responden

Hasil pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat digambarkan pada tingkat distribusi dan tingkat pengembalian (*respon rate*) yaitu Jumlah kuesioner yang didistribusikan sebanyak 112 kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 13 eksemplar dan 5 kuesioner tidak diisi dengan lengkap, kuesioner yang diisi tidak lengkap diakibatkan karena responden mengisi kuesioner hanya beberapa item pertanyaan pada masing-masing variabel sehingga peneliti memutuskan untuk mengeluarkan sebanyak 5 kuesioner yang tidak lengkap dari proses pengolahan data. Berdasarkan tabel diatas maka jumlah kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 94 atau 83,92%.

Analisis Regresi Berganda

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis statistik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, yakni pengaruh Penyajian LKD (X1), Aksesibilitas LKD (X2), dan Komitmen Pimpinan (X3) terhadap Transparansi Pengelolaan LKD (Y). Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients (B)</i>	t hitung	Sig.	Keterangan
<i>Constant</i>	0,565	2,419	0,018	Signifikan
Penyajian LKD (X1)	0,185	0,947	0,346	Tidak Signifikan
Aksesibilitas LKD (X2)	0,082	4,508	0,000	Signifikan
Komitmen Pimpinan (X3)	0,285			
<i>R Square</i>	0.726			
<i>Ajusted R Square</i>	0.717			
T tabel	1,675			
F hitung	79,597			
F tabel	2,557			

Sumber: Data diolah SPSS, 2017

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 0,565 + 0,185X_1 + 0,082X_2 + 0,285 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut maka dapat dilihat arah hubungan dari variabel X_1 sampai dengan X_3 yang ditunjukkan oleh tanda koefisien regresinya. Koefisien regresi variabel X_1 , X_2 , X_3 . yang bertanda positif menunjukkan bahwa setiap penambahan atau kenaikan pada masing-masing variabel tersebut akan berpengaruh positif terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom.

Kelayakan model konseptual kajian ini yang sebesar 0.717 (*Ajusted R Square*) berarti bahwa variabel tranparansi Pengelolaan laporan keuangan daerah mampu dijelaskan dengan baik oleh variabel Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan komitmen pimpinan, dan sebesar 0.717 atau 71,7% sementara sisanya sebesar 28,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model konseptual penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Keerom

Hipotesis pertama dalam kajian ini menyatakan bahwa penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom". Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa nilai t hitung koefisien penyajian laporan keuangan daerah sebesar 2,419 lebih besar dari t tabel sebesar 1.675 dengan signifikansi 0.018 lebih kecil dari nilai p value 0.05 sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak artinya bahwa hipotesis pertama diterima (**H1: diterima**) atau dapat disimpulkan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Keerom. Pemerintah daerah Kabupaten Keerom harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordian, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pernyataan diatas sejalan dengan kajian Aliyah dan Aida Nahar, (2012), Sende (2013), Wiyana dan Sutrisna (2014), Hehanussa (2015) Kurniawati (2016) hasil penelitian menunjukkan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Keerom

Hipotesis kedua dalam kajian ini menyatakan bahwa "Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Keerom". Hasil analisis diatas diketahui bahwa nilai t hitung koefisien penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0,947 lebih kecil dari t tabel sebesar 1.675 dengan signifikansi 0.0346 lebih kecil dari nilai p value 0.05 sehingga H_a di tolak dan H_0 ditrima artinya bahwa hipotesis kedua ditolak (**H2: ditolak**) atau dapat disimpulkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Keerom.

Hasil temuan dalam penelitian ini dapat dijustifikasi bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh masyarakat yang membutuhkan (Mardiasmo, 2000). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya

dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Hasil kajian ini bertolak belakang dengan hasil kajian yang ditemukan Sande, (2013) Hehanussa (2015), Kurniawati (2016), dan Sutrisna (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan hasil penelitian menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Keerom

Hipotesis ketiga dalam kajian ini menyatakan bahwa “Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Keerom”. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai t hitung koefisien penyajian laporan keuangan daerah sebesar 4,508 lebih besar dari t tabel sebesar 1.675 dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari nilai p value 0.05 sehingga H_a di terima dan H_0 ditolak artinya bahwa hipotesis ketiga diterima (**H3: diterima**) atau dapat disimpulkan komitmen Pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom.

Hasil penelitian diatas dapat dijustifikasi komitmen pimpinan mempunyai peran yang kuat dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Peranan pimpinan disini sangat kuat karenan pimpinan mampu mempengaruhi para pegawai didalam organisasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen pimpinan dimaksudkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan serta kepentingan organisasi, dan kemauan yang kuat untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan baik guna mewujudkan masyarakat yang makmur.

Penjelasan diatas sejalan dengan hasil kajian Ridha dan Hardo Basuki (2012) hasil kajian menunjukkan komitmen manajemen berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta. Hasil temuan kajian ini sejalan dengan temuan Adha, (2014) komitmen Pimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka simpulan dari kajian ini adalah;

- 1) Hasil analisis membuktikan bahwa penyajian Laporan keuangan Daerah secara positif dan signifikan mempengaruhi Transparansi Pengelolaan laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa dengan meningkatnya penyajian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Keerom, maka akan di ikuti dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menjadi semakin baik.
- 2) Hasil analisis membuktikan bahwa Hasil ini menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Keerom. Artinya bahwa dengan ketidak meningkatnya Aksesibilitas laporan keuangan daerah akan diikuti sertai dan mengakibatkan transparan pengelolaan laporan keuangan daerah menjadi tidak meningkat.
- 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan daerah Pemerintah kabupaten Keerom. Artinya bahwa komitmen pimpinan dapat mempengaruhi organisasi dimana tergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang dimiliki pimpinan. Untuk memberi balasan atas apa yang telah diterimanya dari organisasi. Sehingga bersedia untuk bekerja keras. maka akan di ikuti dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menjadi semakin baik.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dan kelemahan yang turut mempengaruhi hasil penelitian dan perlu menjadi bahan revisi padapenelitian selanjutnya adalah: **Pertama**, hasil penelitian ini tidak dapat disamakan untuk seluruh pemerintahan, karena ruang lingkup penelitian ini dan jumlah sampel yang terbatas hanya di SKPD Kabupaten Keerom. **Kedua**, keterbatasan objek penelitian yang hanya pada SKPD di Kabupaten Keerom saja. **Ketiga**, penelitian ini hanya menggunakan metode survei kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara, atau terlibat langsung dalam aktivitas pegawai pemerintah, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrument secara tertulis saja. **Keempat**, untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi sampel penelitian. Terutama untuk sampel yang mewakili masyarakat, diharapkan tidak hanya LSM saja yang menjadi sampel penelitian, melainkan misalnya dari pihak pers atau lembaga-lembaga keuangan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan temuan hasil penelitian ini adalah;

1. Dalam penyajian laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Keerom yang dibuat oleh para Dinas, Kantor maupun Badan agar lebih mengikuti standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini dapat mencegah kesalahan penyajian dalam penyajian laporan keuangan.
2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang terjadi pada seluruh Dinas, Kantor maupun Badan pada Pemerintah Kabupaten Keerom harus mampu di ditingkatkan sehingga melalui aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Keerom yang baik maka pertanggung jawaban penggunaan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat diakses melalui media baik surat kabar maupun media elektronik lainnya oleh publik dengan mudah, agar mampu mengeliminasi ada kesalahan manfaat kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Komitmen pimpinan mempunyai peran yang kuat dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan aturan dan prosedur organisasi tentu akan mendorong meningkatnya transparansi pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah & Aida Nahar Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, Volume 8/No. 2/Mei 2012.
ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4353
- Allen, N.J., Meyer P.J. And Smith C.A., 1993 Commitment to Organizations and Occupations: Extention and Test of a Three-Component Conceptualization, *Journal of Applied Psychology*, Vol. 78, No. 4. 1993. publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617
- Anim Wiyana dan Anna Sutrisna S., Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper, ISSN 2460-0784. 2014. www.scribd.com/document/325428016/28-Anim
- Arsyadi M. Ridha dan Hardo Basuki, Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Managemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. 2012. downloadjournals.files.wordpress.com/2013/06/046
- Bastian Indra, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. 2006. www.coursehero.com
- Diamond Jack, Performance Budgeting - is Accrual Accounting Required, IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department. 2002. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=880949&rec=1&srcabs=1127006&alg=7&pos=10
- Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2005. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23423/2/
- Hair, J., F., Jr., Anderson, R., E., Tatham, R., L., dan Black, W., C., *Multivariate Data Analysis*, 5th ed, Upper Saddle River, Prentice Hall International, Inc. 1998. [http://www.academia.edu/1975261/Paper Pengidentifikasian Dimensi-Dimensi Budaya Indonesia Pengembangan Skala dan Validasi](http://www.academia.edu/1975261/Paper_Pengidentifikasian_Dimensi-Dimensi_Budaya_Indonesia_Pengembangan_Skala_dan_Validasi)
- Halim Abdul, Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2007. www.coursehero.com
- Hehanussa Salomi J., Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon, 2nd Conference in Businnes, Accounting and Management, ISSN 2302 – 9791, Vol. 1, Mei 2015. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/294>
- Hood, C.. What happens when transparency meets blame-avoidance?. *Public Management Review*. 2007. <http://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/14719030701340275?scroll=top>
- _____. Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple. *West European Politics*. 2010. <http://christopherhood.net/content/pubs.html>
- <http://nasional.sindonews.com/read/1128841/12/irman-gusman-good-governance-wujudkan-kesejahteraan-1470323352> diakses; 25/08/2016.

- Johnson Dongoran, Komitmen organisasional: Dua Sisi Sebuah Koin, *Dian Ekonomi*, 7 (1), hal. 35-56. 2016.
[http://www.academia.edu/11214102/Variabel Motivasi Disiplin Lingkungan Kerja Komitmen Definisi Operasional Variabl Dan Indikator Penelitian Definisi Operasional Indikator Skor](http://www.academia.edu/11214102/Variabel_Motivasi_Disiplin_Lingkungan_Kerja_Komitmen_Definisi_Operasional_Variabl_Dan_Indikator_Penelitian_Definisi_Operasional_Indikator_Skor).
- Kurniawati, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember), *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. 2016. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73794>
- Luthans, F., *Organizational Behavior*, Ninth edition, McGraw-Hill, New York. 2002. www.amazon.com
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta. UPP STIM YKPN. 2010. <http://lib.mdp.ac.id/perpus/detail/6000353.html>
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2002.
- Magdalena Maria Hesti Kurniawati, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember), *Publikasi Ilmiah*, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. 2016. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73794>
- Mas'ud, F., *Survai Diagnosis Organisasional - Konsep dan Aplikasi*. Badan Penerbit - UNDIP, Semarang. 2004. <https://www.coursehero.com/file/p3ehigm/Challagalla-Goutam-N-dan-Tasaddug-A-Shervani-1996-Dimensions-and-Types-of/>
- Meyer, J. dan B. Rowan. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology*. 1977. http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/org_theory/Scott_articles/meyer_rowan.html
- Mowday, R. T., R. M. Steers dan I. W. Porter, The Measurement of Organizational Commitment, *Journal of Applied Psychology*, 84, p. 408-414. 1979. www.sciencedirect.com/science/article/pii/0001879179900721
- Mulyana Budi, Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1, Mei 2006. eprints.undip.ac.id/30992/1/Skripsi019.pdf
- Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2010. www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/ekonomi
- Nurmuthmainnah, W., Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*, Universitas Hasannudin. 2015. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29595/7/Cover.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://www.scribd.com/document/22794182/PP-No-24-Tahun-2005-Standar-Akuntansi-Pemerintahan>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.slideshare.net/perencanaankota/peraturan-pemerintah-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. [www.ksap.org/peraturan/PP 71 TAHUN 2](http://www.ksap.org/peraturan/PP_71_TAHUN_2)
- Prihartono Eko, *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2009. [eprints.undip.ac.id/17325/1/Eko Prihartono.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17325/1/Eko_Prihartono.pdf).

- Rawlins, B. L. Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust. *Public Relations Journal*. 2008. http://www.prsa.org/SearchResults/view/6D-020202/0/Measuring_the_relationship_between_organizational
- Rohman, Abdul, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang. 2009. <https://www.scribd.com/document/98100152/Pengelolaan-Keuangan-Daerah>
- Sande, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). 2013. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/54>
- Sekaran, Uma, *Research Methods For Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)*, Buku 2, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat. 2006. <http://perpustakaan-wiryawanfamily.blogspot.com/2013/03/research-methods-for-business-buku-1.html>
- Shende, Suresh dan Tony Bennet, *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Publik Financial Administration, UN DESA*. 2004. <https://www.scribd.com/doc/295792578/Pengaruh-Penyajian-Laporan-Keuangan-Daerah-Dan-Aksesibilitas-Laporan-Keuangan-Daerah-Terhadap-Transparansi-Dan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Keuangan-Daerah>
- Silver, D. Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist*. 2005. http://www.prsa.org/Intelligence/TheStrategist/Articles/view/6K-040509/102/Creating_Transparency_for_Public_Companies_The_Con
- Siti Aliyah dan Aida Nahar, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8, No. 2, Mei 2012: 97-189. 2012. ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4353/
- Stiglitz, J. E. *On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life*. Oxford Amnesty Lecture, Oxford, U.K. 1999. <https://www.scribd.com/document/115599379/Stiglitz-J-the-Right-to-Know>
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Penerbit: Alfabeta Bandung. 2005. www.tokobukupenelitian.com Buku Penelitian
- Suryanti Fabanyo, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Sripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2011. <https://Pt.Scribd.Com/Doc/216357813/Pelaksanaan-Fungsi-Pengawasan-Di-Inspektorat-Daerah-Kota-Tidore-Kepulauan>
- Villadsen, A. R. Structural Embeddedness of Political Top Executives as Explanation of Policy Isomorphism. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 2011. [jpart.oxfordjournals.org/content/early/2011/03](http://part.oxfordjournals.org/content/early/2011/03)
- Wendi Adha, (2014) Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai), *JOM FEKON*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/4712>
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26246/1